Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum

Nurjannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
80500222048@uin-alauddin.ac.id

Ita Rukmanasari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
80500222051@uin-alauddin.ac.id

Prades Ariato Silondae

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
80500222045@uin-alauddin.ac.id

Rahmawati Muin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Abdul Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ibnuhaddade@gmail.com

Abstract

This research aims to outline things that are prohibited in business practices both in formal law and Islamic law. This research includes library research, which uses a form of descriptive analysis. The research results show that in the law the things that are not permitted are monopoly, monopsony, market control and conspiracy. In the Islamic economic system, the cause of a transaction being haram is due to three factors, namely haram substances / haram li-dzatihi (pork, khamr, carrion, blood); haram apart from the substance / haram li-ghairihi (tadlis, gharar, iktikar, bai'najasy, usury, maysir, risywah); and the contract is invalid/complete (the pillars and conditions are not fulfilled, ta'alluq occurs, two in one occurs).

Keywords: Business, Law, Islamic Sharia

A. PENDAHULUAN

Transaksi bisnis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Namun demikian, dalam Islam, tidak semua transaksi bisnis diperbolehkan. Terdapat sejumlah larangan yang ditetapkan dalam ajaran Islam terkait dengan jenis-jenis transaksi bisnis tertentu, sebagaimana hukum dasar muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang dalam syariat Islam (Karim, 2016). Larangan-larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan moralitas dalam kegiatan ekonomi.

Transaksi bisnis merupakan salah satu aspek utama kehidupan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip etika dan hukum yang diatur dalam ajaran agama memainkan peran penting dalam mengatur transaksi bisnis. Tujuan utama dari ajaran Islam dalam konteks ekonomi adalah untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat. (Baikuna et al., 2024)

Pentingnya mengenal dan memahami transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam memiliki relevansi yang besar dalam konteks global saat ini. Dengan adanya integrasi ekonomi yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia, umat Muslim dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang larangan-larangan dalam transaksi bisnis menjadi penting untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama. Apalagi transaksi bisnis sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak memahami mengenai praktik-praktik transaksi yang dilarang dalam Islam tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberkahan dari transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini akan mencoba menelaah mengenai transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam. Pendekatan ini akan melibatkan penjelasan tentang latar belakang hukum dan etika Islam yang mendasari larangan-larangan tersebut, serta implikasinya dalam praktik ekonomi modern. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai larangan-larangan ini, diharapkan kita dapat memperkuat fondasi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan keberkahan dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh umat Muslim. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang dilarang dalam praktik bisnis baik secara hukum formal maupun syariat Islam.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yang menggunakan bentuk analisis deskriptif. Studi pustaka (*library research*) merupakan bentuk memperoleh data penelitian dari Kumpulan beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Fadli, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk pemahaman mengenai hal-hal yang dilarang dalam praktik bisnis baik secara hukum formal maupun syariat Islam. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan mengenai perilaku bisnis yang dilarang, perilaku bisnis yang dilarang dalam Undang-Undang, serta perilaku bisnis yang dilarang dalam syariat Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bisnis Terlarang

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan untuk mewujudkan kemashlahatan. Ajarannya selain yang bersifat ilahiyah juga bersifat insaniyah. Mengatur cara menjalin hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur cara berinteraksi antar sesama. Ajaran yang bersifat vertikal berupa ibadah dan ajaran yang bersifat horizontal bernama muamalah. Ibadah dan muamalah dua hal yang mesti menjadi perhatian dalam rangka meraih kehidupan yang bahagia dan sejahtera dari dunia sampai akhirat kelak.

Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan- aturan yang telah disyariatkan Allah SWT. Dalam dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia mestinya terjadi yakni menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, termasuk dalam kegiatan bisnis pun harus dilandasi dengan pandangan etis/etika yang menjadi dasar transaksional antara pelaku bisnis dan customer guna mewujudkan nilai ibadah dalam kehidupan dunia dan akhirat.(Muis, 2021) Kreteria hukum antara ibadah dan muamalah berbeda dalam hal boleh tidaknya untuk dikerjakan. Dalam hukum ibadah orang tidak serta merta boleh melakukan kecuali ada perintah yang mendasarinya. Seperti shalat, puasa, zakat dan haji, umat Islam mengerjakannya karena telah jelas adanya perintah agar mengerjakan ibadah tersebut. Sebaliknya dalam hukum bermuamalah, semua boleh umat Islam mengerjakannya kecuali terdapat larangan ketidakbolehannya. Apabila terdapat larangan terhadap suatu bentuk interaksi, maka umat Islam tidak boleh mengerjakannya.(Karim, 2016) Mengenai hukum muamalah, para ahli mendefinisikannya sebagai hukum keperdataan Islam. Sekumpulan aturan Allah dan Rasul yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta memuat pula tatacara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Ketentuan muamalah bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qias serta dengan memperhatikan pula metodologi penentuan hukum dari para ulama. Melalui sumber ini terjamin kebenarannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.(Habibullah, 2018)

Melihat defenisi di atas, hukum muamalah cakupannya sangat luas sekali. Mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Mencakup aturan hukum pada semua sektor usaha masyarakat. Di antara sektor tersebut termasuk bisnis pengelolaan dan pengembangan harta benda dalam bentuk transaksi keuangan. Individu atau organisasi melakukan kegiatan bisnis dalam menciptakan nilai produk barang dan jasa. Hasil bisnis untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin hari tuntutan kebutuhan manusia semakin meningkat. Dalam kondisi ini bermunculan bentuk dan jenis bisnis di masyarakat seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya

seperti tersebut di atas mengenai muamalah, semua bisnis boleh kecuali ada larangan yang tidak membolehkannya. Seorang muslim tentu harus mengetahui jenis bisnis yang terlarang agar bisa menghindarinya. Tidak ada gunanya berpenghasilan tetapi bersumber dari bisnis yang tidak halal. Akibatnya akan merugikan dan merusak keberkahan hidup sendiri.

Dalam fiqih muamalah atau yang spesifik buku-buku bernuansa ekonomis syariah terdapat penjelasan mengenai bisnis terlarang. Ahli fiqih tidak menyebutkan secara langsung bentuk dan jenisnya. Mereka menyebutkan kaedah atau rumus umum saja dan apabila salah satu unsurnya ada maka bisnis itu tergolong terlarang. Pelaku bisnis terlarang tentu saja berdosa di sisi Allah. Secara pribadi mungkin saja untung, tetapi merugikan pihak lain. Lima hal yang membuat suatu bisnis menjadi terlarang yaitu ; Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil.

Dalam perekonomian Islam telah memaparkan tentang etika yang harus dilaksanakan oleh pedagang dalam melakukan aktivitas jual beli. Etika ini diharapkan menjadi pedoman bagi pedagang selain untuk mendapatkan keuntungan dunia, juga mendapatkan keuntungan akhirat. Etika bisnis Islam memastikan, baik penjual maupun pembeli akan sama-sama diuntungkan. Islam melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan aktivitas terlarang lainnya. Tetapi Islam memberikan suatu batasan hal apa saja yang halal dan haram dilakukan yang dinamakan dengan etika. Aktivitas dalam dunia perdagangan juga dikenal adanya konsep moral atau konsep etika bisnis. Para pedagang harus menerapkan konsep moral ke semua ruang lingkup perdagangannya.

B. Perilaku Bisnis yang dilarang dalam Undang-Undang.

Negara demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, setiap pelaku usaha harus mewujudkan persaingan yang sehat dan wajar. Iklim usaha yang sehat dapat mencegah munculnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Pemerintah pun mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan ini tercantum dalam Pasal 17 sampai 28. Pada Pasal 17 hingga 24, ada empat kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. (Syaputra & Wahyudi, 2023)

a. Monopoli

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Pasal 17, pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa jika: produk yang

bersangkutan belum ada substansinya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen dari satu pangsa pasar.

b. Monopsoni

Monopsoni merupakan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 18, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen dari satu pangsa pasar.

c. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar merupakan penguasaan satu atau beberapa kegiatan oleh satu pelaku usaha maupun bersama pelaku usaha lain. Dalam Pasal 19, kegiatan yang dilarang, yaitu: menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya itu membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Terkait penguasaan pasar ini, pelaku usaha juga dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Para pelaku usaha pun dilarang curang dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lain yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.

d. Persekongkolan

Persekongkolan merupakan usaha bersekongkol antara pelaku usaha dan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Pelaku usaha juga dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi rahasia terkait kegiatan usaha pesaingnya. Selain itu, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan pemasaran produk pesaingnya dengan maksud agar produk tersebut berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu.

Tak hanya itu, UU Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominannya untuk: menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk menghalangi konsumen memperoleh produk yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas membatasi pasar dan pengembangan teknologi menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Seorang yang menjabat direksi atau

komisaris suatu perusahaan juga dilarang merangkap jabatan sama pada perusahaan lain. Aturan ini berlaku jika perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama dan secara bersama dapat menguasai pangsa pasar tertentu. Pelaku usaha pun dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama.

Terakhir, UU ini juga mengatur larangan terkait penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha. Pelaku usaha dilarang melakukan tindakan-tindakan ini jika dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. Perilaku Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi dua yaitu transaksi halal dan haram. Hukum dasar ibadah adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali yang dilarang, sedangkan hukum dasar muamalah adalah segala sesuatunya dilarang kecuali yang diperbolehkan. (Karim, 2016) Sehingga, sebagai umat muslim sangat penting untuk mengetahui apasaja yang dilarang dalam suatu transaksi bisnis, sehingga kita dapat melakukan transaksi bisnis sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini kita diperbolehkan untuk melakukan inovasi untuk pengembangan bisnis selama tidak melanggar aturan syariat. Dalam sistem ekonomi Islam penyebab haramnya suatu transaksi dikarenakan oleh tiga faktor yakni haram zatnya / *haram li-dzatihi*, haram selain zatnya / *haram li-ghairihi*, dan tidak sah/lengkap akadnya.

1. Haram Zatnya

Transaksi dilarang karena objek (barang/jasa) yang ditransaksikan juga terlarang. Misalnya : minuman keras, daging babi, bangkai, dan lainnya, jadi transaksi jual beli tersebut adalah haram, walaupun akad jual- belinya sah. (Cahyono, 2020)

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

{ 110

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nahl/16:115) (Al-Qur’an dan Terjemahan, 2010)

2. Haram Selain Zatnya

- a. Melanggar Prinsip “*An Taraddin Minkum*” maksudnya adalah transaksi dalam Islam harus berdasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). (Robinson, 2014) Sebagian dari ulama mengatakan “*antaradin minkum*” (kalian saling ridha), yang dimaksud disini adalah jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan, artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. (Ardhinata & Fanani, 2015)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ ۲۹ ﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)(Al-Qur'an dan Terjemahan, 2010)

Para pihak harus mempunyai informasi yang seimbang (*complete information*) *Assymetric information* atau *unknown to one party* yang dalam bahasa fiqih disebut TADLIS adalah transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yakni :

- 1) Kuantitas, contohnya pedagang mengurangi takaran
 - 2) Kualitas, contohnya pedagang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya
 - 3) Harga (ghaban), contohnya pedagang menaikkan harga barang di atas harga pasar karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar
 - 4) Waktu penyerahan, contohnya pedagang yang berjanji akan mengirimkan barangnya dalam dua hari padahal dia tahu bahwa hal tersebut tidak mungkin bisa dipenuhinya.
- b. Melanggar Prinsip “*La Tazhlimuna Wa La Tuzhlamun*” maksudnya jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya: (Robinson, 2014)
- 1) Rekalitas Pasar dalam *supply (Ikhtikar)*, terjadi bila produsen mengambil keuntungan di atas normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar terjadi bila syarat di ini terpenuhi yakni: Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan menimbun stock atau mengenakan *entry-barriers*; Menjual dengan

harga yang lebih tinggi pada saat terjadi kelangkaan barang; Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan.

- 2) *Rekayasa Pasar dalam Demand (Ba'i Najasy)*, terjadi bila produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Contohnya: dalam bursa saham, bursa valas, dan lainnya. Rekayasa permintan dilakukan dengan menciptakan permintaan palsu secara terus menerus seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produknya naik. Rekayasa permintaan akan mengakibatkan harga saham akan naik secara tidak normal sehingga mempengaruhi orang lain untuk membeli saham, sebab saham yang naik dianggap investor sebagai saham yang diminati dan likuid (aman). Investor yang tadinya tidak mau membeli saham tersebut, akan tertarik mengambil. (Siregar, 2017)
- 3) *Taghrir (Gharar)*, adalah situasi dimana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti. Gharar juga dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu : Kuantitas, contohnya ijon; Kualitas, contohnya membeli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya; Harga, contohnya pembiayaan murabahah rumah 1 tahun margin 20%, 2 tahun margin 40% yang kemudian disepakati nasabah tanpa menentukan pilihannya 1 atau 2 tahun; Waktu penyerahan, contohnya menjual barang yang 40% yang kemudian disepakati nasabah tanpa menentukan pilihannya 1 atau 2 tahun; Waktu penyerahan, contohnya menjual barang yang hilang yang belum jelas kapan akan diketemukan dan kapan akan dapat diserahkan
- 4) Riba, dalam ilmu fiqih dikenal 3 jenis riba, yaitu : (Robinson, 2014)
 - a) Riba Fadl (riba buyu), yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawaan bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Contoh riba fadl dalam perbankan adalah dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot)
 - b) Riba Nasi'ah (riba duyun), yaitu riba yang timbul akibat transaksi yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Riba Nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi al ghunmu (untung) muncul tanpa

adanya al ghurmi (resiko), al kharaj (hasil usaha) muncul tanpa adanya dhaman (biaya); yang mana al ghunmu dan kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Contoh riba nasi'ah yaitu pembayaran bungakredit, bunga deposito, tabungan, giro, dan lainnya.

- c) Riba Jahiliyah, adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Contoh riba jahiliyah adalah dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.
- 5) *Maysir* (Judi). Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan maisir adalah qimar, yaitu permainan untung-untungan (game of chance) atau dapat dikatakan maisir adalah perjudian. Juga dengan Siddiqi mendefinisikan Judi disebut maisir. Menurut Prespektif Islam maisir juga didefinisikan sebagai spekulasi atau untunguntungan, ada tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau maisir yaitu:
- a) Ada taruhan harta/atau materi yang bersumber dari kedua pihak yang berjudi;
 - b) Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah;
 - c) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Sehingga, *maysir* dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi. (Zulfaa, 2018)

- 6) *Risywah* (Suap-Menyuap). *Risywah* adalah pekerjaan yang dilarang dan pelaku dan penerimanya adalah dilaknat. Walaupun kadang tampak pemberian suap ini seperti hadiah tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan permasalahan hukum atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang memberi dan yang diberi. Dalam hal pemberian hadiah adalah pekerjaan mubah yang dibolehkan, akan tetapi jika pekerjaan yang bersifat mubah ini menyebabkan ke arah penyipuan atau menyebabkan tidak adilnya seseorang dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban atau tidak adil dalam menetapkan hukum, maka hukum pemberian ini bias menjadi haram.

3. Tidak Sah/Lengkap Akadnya

Transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkapakadnya bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:(Faizal, 2017)

a. Rukun dan Syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, yang terdiri dari 3 hal, yaitu : Pelaku, bisa berupa penjual-pembeli, penyewa- pemberi sewa, penerima upah-pemberi upah. Objek, bisa berupa barang dan jasa. Ijab-Kabul, dalam terminologi fiqih maksudnya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Berkaitan dengan kesepakatan, akad akan batal apabila terdapat:

- 1) Kesalahan/kekeliruan objek
- 2) Paksaan (ikrah)
- 3) Penipuan (tadlis)

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Bila rukun telah terpenuhi, tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak) Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Keberadaan syarat juga tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, dan mencegah berlakunya rukun.

b. Terjadi *Ta'alluq*

Ta'aluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqih, kasus ini disebut dengan *bai' al-'inah*.

c. Terjadi “*two in One*”

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan/berlaku. Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*, *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi: objek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama. Bila salah satu saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Contoh dari *two in one* adalah transaksi

lease and purchase (sewa-beli). Dalam transaksi ini terjadi *gharar* dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-beli ini diharamkan.

D. KESIMPULAN

Dalam perekonomian Islam telah memaparkan tentang etika yang harus dilaksanakan oleh pedagang dalam melakukan aktivitas jual beli. Etika ini diharapkan menjadi pedoman bagi pedagang selain untuk mendapatkan keuntungan dunia, juga mendapatkan keuntungan akhirat. Etika bisnis Islam memastikan, baik penjual maupun pembeli akan sama-sama diuntungkan. Islam melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan aktivitas terlarang lainnya. Dalam Undang-Undang hal yang tidak diperbolehkan adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Dalam sistem ekonomi Islam penyebab haramnya suatu transaksi dikarenakan oleh tiga faktor yakni haram zatnya / *haram li-dzatihi* (babi, khamr, bangkai, darah); haram selain zatnya / *haram li-ghairihi* (*tadlis, gharar, ikhtikar, bai'najasy, riba, maysir, risywah*); dan tidak sah/lengkap akadnya (tidak terpenuhinya rukun dan syarat, terjadi *ta'alluq*, terjadi *two in one*).

Sebagai umat muslim sangat penting untuk mengetahui apasaja yang dilarang dalam suatu transaksi bisnis, sehingga kita dapat melakukan transaksi bisnis sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini kita diperbolehkan untuk melakukan inovasi untuk pengembangan bisnis selama tidak melanggar aturan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2010). *Departemen Agama RI*. CV Diponegoro.
- Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online. *JESTT*, 13(1), 47–60.
- Baikuna, L., Rohmah, N. A., Yati, H. F., Anjelina, N. U., & Sujianto, A. E. (2024). Studi Kajian Uang dan Moneter dalam Sistem Keuangan Islam. *Musytari*, 5(6).
- Cahyono, H. (2020). Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 1(2), 14–27. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.171>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 56–79. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/32>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan*

Bisnis Islam, 2(01), 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>

Karim, A. A. (2016). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (ke-5). CV Pustaka Setia.

Muis, B. (2021). Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 32–44. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.628>

Robinson. (2014). Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 27. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5265>

Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal. *Yurisprudentia*, 3(2), 70–80.

Syaputra, F., & Wahyudi, M. (2023). Kegiatan yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *At-Tabayyun*, 6(1), 12–24.

Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 2(1), 1–15.